

Separatisme Etnis Bukan Sekadar Sebuah Wacana

Muhammad Idrus

An important step to attain good process for national integrity is to demolish some negative aspects of cultural behavior. The autonomy must be put in the hand of local government, psychological gap among public servants, 'distance' between the leaders and ordinary people must be minimized. Beside debirocratization is a compulsory, legal certainty must be enforced. Indeed, the equal chance to get the rights must be available for everyone.

Koentjaraningrat (1993) dalam catatannya mengungkap bahwa dari 175 negara yang tercatat di PBB, hanya 12 negara saja yang memiliki penduduk "agak" homogen. Indonesia termasuk di antara negara-negara yang tidak homogen, dengan kurang lebih 358 suku bangsa dan 200 sub-suku bangsa.

Harus diakui pada satu sisi, pluralisme suku bangsa di Indonesia merupakan potensi pembangunan dan keberkembangan yang luar biasa, dan selain itu juga dapat dimaknai sebagai pencerminan kekayaan budaya masyarakat bangsa ini. Namun, di lain sisi pluralisme ini bukan tidak mungkin menjadi potensi destruktif bagi hadirnya model negara kesatuan seperti sekarang ini.

Bervariasinya etnis dan budaya yang melebur dalam satu wadah negara kesatuan merupakan keinginan membangun bangsa berdasar keanekaragaman (kebhinekaan). Tentu saja pada kondisi tersebut dibutuhkan prasyarat yang mungkin

saja merugikan kelompok tertentu, sisi lainnya menguntungkan kelompok lain. Budaya daerah akan menimbulkan perilaku dan sikap mental yang khas kedaerahan, yang terkadang hal tersebut berbeda dengan yang ada di daerah lain. Hal inilah yang disinyalir oleh Alfian (1986) sebagai satu hal yang kurang menguntungkan bagi pembangunan, sikap mental masyarakat Indonesia yang majemuk.

Etnis dapat menjadi sebuah kekuatan yang memicu perlawanan. Pada masa penjajahan dapat disaksikan betapa ikatan kedaerahan dan suku mampu menjadi salah satu cara efektif untuk menggalang kekuatan melawan kekuasaan pemerintahan Kolonial. Dari sejarah ini dapat disimpulkan betapa etnis/suku/ras mampu menjadi pengikat untuk aksi menyempal baik dengan perlawanan bersenjata — seperti kebanyakan yang dilakukan para pejuang daerah—, ataupun gerakan tanpa senjata seperti yang dilakukan Surosentiko Samin, dengan gerakan Saminya.

Bermula dari gerakan Budi Utomo, yang sebenarnya juga masih kental nuansa kedaerahannya namun mulai mencanangkan visi nasionalisme, mulailah dibangun gerakan yang lebih menonjolkan nuansa nasionalisme dengan beranggotakan banyak etnis yang berbeda. Puncak kebersamaan kedaerahan tersebut kemudian melebur menjadi janji bersama 28 Oktober 1928. Sejarah yang kemudian bergulir membuktikan kemampuan masyarakat bangsa ini menyatu dalam satu negara kesatuan.

Etnis, Potensi Separatisme

Pasca pemerintahan kolonial, memang tidak kita saksikan gerakan-gerakan yang mengatasnamakan etnis yang menonjol. Begitu juga pada masa orde lama terlebih pada masa orde baru. Hal tersebut mungkin karena begitu kuatnya negara (penguasa) meredam gerakan-gerakan separatis semacam itu, atau mungkin klasifikasi itu tidak kita temukan karena kerapnya negara (penguasa) mengelompokkan gerakan semacam itu pada satu istilah **GPK** (Gerakan Pengacau Keamanan).

Gerakan menyempal atas nama etnis baru menyeruak pasca lengsernya Soeharto sebagai presiden. Tuntutan akan kemerdekaan mula-mula muncul dari kelompok CNRT (Dewan Perlawanan Nasional Bangsa Timor) dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka)¹. Diawali dari peluang yang

¹Sejak ditandatanganinya perjanjian damai antara negara Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 9 Desember 2002, maka secara tidak sengaja saat ini pemerintahan Megawati telah mendudukkan GAM setara dengan negara. Tampaknya situasi ini akan semakin sulit untuk merengkuh Aceh sebagai bagian dari negara RI di masa-masa akan datang.

diberikan B.J Habibie —selaku presiden saat itu— yang menawarkan opsi otonomi penuh atau merdeka bagi rakyat Timor-Timur, maka menjelang berakhirnya milenium kedua ini Indonesia harus melepas salah satu propinsinya, Timor-Timur untuk merdeka yang beralih nama menjadi Negara Timor Leste.

Peluang ini menjadi pemicu keinginan serupa pada beberapa etnis tertentu, sebut saja Irian Jaya (sejak 1 Januari 2000, secara resmi disebut Papua) yang berkeinginan mendirikan Papua Merdeka, masyarakat Sulawesi dengan 'Negara Indonesia Timur', 'Makasar Merdeka' khusus untuk Masyarakat Sulawesi Selatan, 'Riau Merdeka', Kalimantan Timur, ataupun Aceh dengan 'Gerakan Atjeh Merdeka', dan belakangan ini sekelompok warga Maluku yang menamakan dirinya RMS (Republik Maluku Selatan). Meski para penuntut hak kemerdekaan tidak dapat sepenuhnya dikatakan mewakili keinginan seluruh masyarakat yang bersangkutan, namun fenomena ini harus disikapi secara lebih bijak.

Sebenarnya kesadaran menjadi suatu bangsa bagi satu etnis, bukanlah persoalan baru. Setidaknya sejarah telah membuktikan bahwa pada masa kerajaan-kerajaan di Nusantara dahulu fenomena itu tampak mendominasi alam pikiran para elite pemegang kekuasaan. Dari sejarah tersebut kita belajar bahwa "dahulu" ada banyak bangsa (bukan suku) di Nusantara ini. Barangkali inilah yang oleh Eriksen (1993) dimaknai sebagai identitas sosial²,

²Tajfel (dalam Berry, dkk, 1992) memaknai identitas sosial sebagai bagian dari konsep diri sebagai derivasi pemahamannya tentang keanggotaannya dalam kelompok sosial, termasuk nilai dan emosional yang melekat terhadap para anggotanya.

yang membedakan bangsa satu dengan dari bangsa lainnya.

Mentengarai menguatnya fenomena rasa nasionalisme dari etnis-etnis tertentu pada akhir-akhir, pada satu sisi hal ini menunjukkan adanya kesadaran psikologis –sebagai *ethnic identity*–, dan pada lain sisi bukan hal yang mustahil justru menjadi keprihatinan. Sebagai kesadaran psikologis mengingat hal tersebut menunjukkan adanya kesadaran akan identitas kedirian pada masing-masing etnis, sedangkan akan menjadi sebuah keprihatinan tatkala persoalan tersebut terpolusi dengan nuansa politis, yang pada ujung-ujungnya mengarah pada masalah disintegrasi bangsa.

Fenomena konflik dengan berbasis pada persoalan etnis bagi Donald L. Horowitz (1985) merupakan fenomena yang hadir di banyak bangsa di seluruh dunia. Bahkan Toffler (1990) –sang futurolog— memprediksikan masalah suku bangsa ini akan terus berlanjut hingga abad XXI. Lantas, jika belakangan ini wacana etnonasionalisme ini mengemuka, apakah hal ini senyatanya persoalan harga diri satu etnik, atau adakah persoalan lain yang lebih dikedepankan oleh para pembawa ide ini?

Menyadari adanya keragaman etnis dalam masyarakat bangsa Indonesia, maka sudah sewajarnya jika diskursus tentang persoalan etnonasionalisme mendapat perhatian yang serius. Sebab jika tidak, maka yang muncul adalah fenomena disintegrasi yang menghendaki terpisahnya satu etnis dari negara kesatuan Indonesia ini. Artinya, masalah yang terkait dengan etnis hendaklah dibincangkan dengan seksama dengan kesadaran untuk mendukung tercapainya kesepakatan nasional seperti yang pernah diungkap oleh para pendahulu pendiri republik ini. Banyak hal yang terkait dengan wacana ini seperti

politik dan psikologis, serta relasi sosial yang mungkin menjadikan kuatnya nuansa separatisme pada etnis tertentu.

Tarik Ulur Dimensi Politik dan Psikologi

Harus diakui bahwa munculnya persepsi bahwa etnik adalah bangsa tidak terlepas dari intervensi politik. Inipula yang pernah dibangun oleh salah satu kelompok partai dengan model Iramasuka (Irian, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan). Para individu yang menggalang model ini melakukan identifikasi dirinya sebagai kelompok etnis tertentu, dan berharap bahwa muncul dukungan dari etnis yang mereka identifikasi untuk dapat terus berlaga di kancah politik.

Jika hal itu harus dianggap sebagai suatu perjuangan, maka yang diperjuangkan adalah seputar masalah yang oleh Mitchell (1974) disebutnya sebagai *privileges* dan *power*. Disinilah tampak terjadinya kesenjangan distribusi kekuasaan dan perlakuan antar etnis yang berbeda. Dalam tulisannya Arifin (2001) mensinyalir bahwa pelbagai kerusakan yang muncul dan keinginan beberapa propinsi untuk memisahkan diri lebih disebabkan oleh kesenjangan sosial dan ketimpangan pembangunan sosial, politik dan ekonomi antara Jakarta (Jawa) dan Luar Jawa (non-Jawa).

Arifin (2001) juga mengungkap terjadinya dominasi kekuasaan Jawa, dan terjadinya proses Jawanisasi. Jawanisasi bagi Arifin merupakan satu sikap arogan (dalam antropologi konsep ini dikenal sebagai etnosentris), sebuah sikap yang menganggap budaya lain sebagai kurang bermutu, dan kurang sempurna. Tentu saja, Jawanisasi ini jelas-jelas melanggar apa yang selama ini hendak dihilangkan pemerintah itu sendiri yaitu penghapusan

SARA (suku, agama, ras dan antar golongan). Bahkan mungkin pula terjadi pelanggaran HAM, karena adanya unsur yang secara jelas menganggap remeh suku dan ras lain.

Beberapa proses Jawanisasi tampak dalam upaya negara menempatkan orang-orang asal Jawa sebagai pejabat di daerah-daerah luar Jawa. Atawa dengan banyaknya penggunaan kosa kata Jawa pada nama tempat/desa transmigran (Misal *Sida Mulya –Sido Mulyo-, Sidareja –Sidorejo-*, dan banyak lainnya yang lebih mengkonotasikan nama-nama desa di daerah Jawa), nama-nama lembaga resmi milik negara (seperti *Dharma Wanita, Karang Taruna, Sasana Wiratama*), nama gedung milik negara (*Bina Graha, Graha Purna Yudha*). Semboyan untuk lembaga atau program resmi pemerintah (*Jales veva jaya mahe, Yudha Dharma, tat twam asi, ing ngarso sung tulodo ing madya mbangun karso, tut wuri handayani, adipura, kalpataru*). Nilai-nilai hidup yang harus diamalkan (*tepa salira, sabar, rela, narima*), dan banyak lagi yang bagi orang luar Jawa terasa begitu asing di telinga, bahkan cenderung aneh.

Dampak yang ditimbulkan dari model Jawanisasi itu, memang luar biasa. Safa'at (1996) menemukan beberapa bentuk kerugian dan eksekusi penerapan sistem pemerintahan desa, yaitu (1) merusak sistem kekerabatan; (2) memutuskan hubungan-hubungan sosial ekonomi antara masyarakat adat dengan tanah asalnya; (3) menghilangkan sistem politik lokal yang mengatur wilayah kesatuan masyarakat adanya.

Hasil temuan Safa'at ini setidaknya membenarkan kondisi etnis tertentu yang bersikukuh untuk mempertahankan budayanya, dan tentu saja dengan mengisolasi

pengaruh budaya lain terhadap mereka. Kepada kelompok ini maka secara mudah dikelompokkan dalam kelompok etnis yang terbelakang (untuk tidak menyebutnya sebagai primitif). Dampak lebih jauh lagi dapat terbaca pada fasilitas yang diperoleh daerah tersebut, yang belakangan diidentifikasi sebagai Desa Tertinggal. Kesengajaan atukah sebuah pilihan bagi etnis yang hendak mempertahankan identitasnya? Jika demikian, salahkan masyarakat GAM yang kemudian menyebut telah terjadi kolonialisme Jawa di tanah mereka?

Fenomena ini kemudian pada akhirnya menyadarkan banyak etnis akan adanya hegemoni kekuasaan kelompok mayoritas atas minoritas. Mayoritas dan minoritas dalam terminologi ini penulis lebih sepakat dalam makna yang diberikan oleh Young sebagaimana dikutip oleh Martin dan Franklin (1973) sebagai kelompok inferior, yang memiliki posisi subordinat dalam masyarakat, dan bukan sekadar persoalan jumlah komunitasnya, tapi lebih pada *power*. Mengingat posisinya, pada akhirnya kelompok-kelompok tersebut mengalami banyak kekurangan dalam menikmati "kue pembangunan" yang selama ini didengung-dengungkan.

Tentu saja pada ujung-ujungnya terjadi interaksi sosial yang tidak harmonis antar etnis dalam negara, yang kemudian memunculkan sikap ethnosentris³. Pada

³Segall, dkk (1990) mengartikan ethnosentrisme sebagai suatu perasaan positif terhadap kelompoknya sendiri (in-group), dan perasaan negatif terhadap kelompok lain (out-group). Secara lebih sederhana ethnosentris dapat dimaknai sebagai sikap yang muncul dalam diri setiap etnis yang memandang nilai yang ada dalam etnisnya sebagai yang terbaik, dan nilai kelompok lain sebagai yang lebih rendah.

giliran selanjutnya sikap ini akan menumbuhkan satu sikap prasangka sosial⁴. Dapat diduga saat terjadi prasangka sosial negatif, maka akan memunculkan sikap diskriminatif terhadap etnis yang dianggapnya lebih rendah. Dalam hal ini Liliweri (1994) mengungkap ada tiga faktor utama yang dibentuk oleh sikap prasangka sosial ini, yaitu yang disebutnya sebagai (1) stereotipe; (2) jarak sosial; dan (3) sikap diskriminatif.

Stereotype merupakan gambaran subjektif dari golongan manusia yang lain terhadap manusia tertentu, dan gambaran ciri-ciri subjektif yang diberikan oleh satu suku-bangsa kepada warga suku-bangsa lain secara khusus disebut sebagai stereotype etnik (Koentjaraningrat, 1982). Saat ini banyak berkembang di sekitar kita stereotype etnik tertentu, misalnya suku bangsa X identik dengan kekasarannya, sementara etnis Y dengan kehalusan. Adapun stereotype manusia Indonesia dikotonasikan sebagai bangsa yang ramah, bangsa yang mudah bergaul dan sebagainya. Pada masa pemerintahan orde baru, masyarakat Indonesia ideal adalah manusia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, atau secara lebih khusus memiliki beberapa sikap seperti para tokoh pewayangan. Terkait dengan hal ini menarik mengungkap tentang gugatan Arifin (2001) terkait dengan proses Jawanisasi sikap.

"...bukan suatu rahasia bahwa masyarakat Indonesia dididik untuk

memiliki sikap ksatria: mengatakan dan mengakui salah jikalau salah; benar jikalau benar. Akan tetapi, ketika pembantu-pembantu presiden jelas-jelas bersalah dan kesalahan itu diketahui oleh publik, tak satupun dari para pembantunya yang dengan rendah hati mengakuinya dan meminta maaf atau bahkan mengundurkan diri. Pengunduran diri dianggap tidak memiliki alasan yang kuat, karena perbuatan itu sama artinya dengan sikap tidak ksatria (*tinggal glanggang colong playu*, penulis).

Stereotype yang ingin dibentuk oleh Negara terhadap masyarakatnya adalah memunculkan model manusia Indonesia yang berjiwa ksatria. Seorang yang memiliki sikap dan perilaku luhur, menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai ksatria.

Hanya saja sebagaimana gugatan Arifin, proses *stereotype* tersebut menjadi bergeser dari alur yang diharapkan. Terjadi dualisme dalam model sikap ksatria yang saat ini diterapkan oleh masyarakat bangsa ini. Satu sisi seorang manusia Indonesia diharuskan tampil sebagai seorang ksatria, sebagaimana epos Mahabarata, ataupun Ramayana, yang selalu membela kepentingan kaum lemah (*dhuafa*), dan bersikap sebagaimana layaknya seorang ksatria yang jika dirinya salah, maka akan dengan arif dan bijak mengakui segala kesalahannya, tetapi jika pada posisi benar, maka kebenaran akan dibelanya meski harus berkorban jiwa.

Namun tatkala terjadi penyimpangan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh para pembantu Presiden, justru sikap yang ditampilkan bukanlah sikap seorang ksatria, namun sikap seorang *kurawa* yang bersikukuh dengan pendapatnya sendiri. Pemimpin tidak pernah melakukan kesalahan, dan andai ada kesalahan, maka

⁴ Prasangka sosial merupakan sikap perasaan orang-orang terhadap golongan tertentu (ras, etnis, kebudayaan) yang berlainan dengan dirinya. Prasangka sosial cenderung negatif (Gerungan, 1988).

bawahanlah yang salah menginterpretasi perintah yang diberikan pemimpin atau komandannya. Beberapa peristiwa sipil dan militer menguatkan fenomena ini, bahwa hanya bawahan yang melakukan kesalahan.

Terhadap para pemimpinnya manusia Indonesia dituntut bersikap *nyunggi dhuwur, mendem jero*. Sikap yang selalu menghormati pemimpinnya, dan menutup secara rapat segala kesalahan yang dibuat oleh para pemimpinnya. Dalam masyarakat yang plural, situasi itu tidak mungkin dapat dibenarkan.

Keinginan untuk transparansi di satu sisi, dan mempertahankan *prestige* pemerintahan menjadikan benih subur munculnya rasa tidak percaya pada pemegang kekuasaan. Situasi ini jika hanya terjadi pada individu mungkin dapat secara mudah diberangus pemerintah, dengan cara mencapnya sebagai orang yang *mbalelo*. Hanya saja, jika itu kemudian menyebar pada komunitas etnis yang lebih luas, maka yang muncul adalah perlawanan etnis yang kemudian diistilahkan sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) atau kelompok separatis.

Dampak lain dari prasangka sosial adalah munculnya jarak sosial (*social distance*). Liliweri (1994) mengungkap bahwa jarak sosial antar etnis ditentukan oleh kesediaan individu dari etnis tertentu untuk membangun interaksi dengan individu lain dari etnis yang berbeda. Interaksi sosial dalam masyarakat individu haruslah dibangun dengan kesadaran bahwa setiap individu memiliki harkat dan derajat yang sama. Meski untuk beberapa etnis, relasi sosial ini baik, tapi tidak juga menutupi kenyataan bahwa relasi yang dibangun untuk etnis tertentu tidaklah sebagaimana diharapkan.

Relasi etnis Madura-Dayak, menjadi salah satu contoh terjadinya jarak sosial yang begitu jauh. Untuk kedua etnis tersebut, harus diakui hingga kini masih kerap terjadi silang-sengketa dan ketegangan yang terutama muncul di kalangan masyarakat awam dengan tingkat pendidikan rendah. Pelbagai penyelesaian yang diupayakan kelompok elit etnis tersebut ternyata belum menuntaskan persoalan di akar rumput. Hingga hari ini kita bisa menyaksikan hasil-hasil pertikaian kedua etnis ini. Sebenarnya mungkin bukan hanya kedua etnis ini saja yang memiliki jarak sosial begitu jauh, ada banyak etnis yang mungkin secara tidak sengaja memiliki jarak sosial yang tidak dekat, hanya saja tampaknya tidak mengemuka dalam konflik terbuka sebagaimana kedua etnis ini.

Jarak sosial bukan hanya muncul dari sisi etnis saja, namun juga dari friksi antar organisasi baik keagamaan, sosial ataupun organisasi partai politik. Sebagai misal bagaimana jauhnya jarak sosial antara massa organisasi massa Nahdatul Ulama dengan Muhammadiyah di kalangan awam. Betapa untuk satu persoalan yang elite organisasi tersebut dengan mudah memahaminya, tapi di kalangan bawah justru menjadi pemicu terjadinya konflik yang sulit untuk reda. Atau contoh lain belum sepatatnya para pimpinan organisasi agama Budha untuk menunjuk orang yang dianggap mewakili mereka di MPR. Kita lihat juga betapa para simpatisan partai politik yang saling bersitegang atau bahkan saling baku hantam saat kampanye menjelang pemilu beberapa tahun terakhir.

Juga kita saksikan betapa renggangnya ikatan antara kelompok-kelompok yang mewakili orang-orang kaya dengan mereka yang miskin. Konflik antara

pedagang dengan petugas Tibum pada beberapa pasar yang masing-masing ingin eksistensinya dihargai. Kesemua contoh di atas menunjukkan betapa jarak sosial antar masyarakat Indonesia masih rendah, dan ini rawan serta menjadi benih subur timbulnya konflik.

Kondisi terakhir yang muncul dari prasangka sosial adalah hadirnya perilaku diskriminasi. Para pejabat negara, pemegang kekuasaan di Indonesia belum seluruhnya dapat berlaku adil. Kolusi dan nepotisme adalah salah satu wujud terjadinya diskriminasi. Semua aturan yang dibuat, selalu dicari celah untuk mewujudkan keinginan-keinginan yang bersifat primordial. Pada akhirnya terjadilah model penempatan pegawai, pejabat yang berorientasi suku-isme. Bukan hanya itu, muncul pula model stereotype etnis negatif, bahwa jika etnis tertentu yang memegang posisi puncak dianggap tidak mampu, dan akhirnya kepada yang bersangkutan tidak pernah mendapat promosi jabatan puncak meski secara profesional dirinya mampu.

Sistem kekuasaan yang sentralistik dan berpusat di Jakarta (Jawa), sehingga persoalan birokrasi dan kebijaksanaan daerah diatur sejak dari pusat (Jakarta, Jawa). Pada sisi ini, kita lihat kerap terjadi posisi-posisi strategis jabatan di daerah diisi oleh orang-orang Jakarta (Jawa), atau mereka yang dekat dengan kekuasaan di Jakarta. Sementara kader daerah terkadang hanya sekedar pendamping pelengkap semata. Yang kemudian terjadi adalah adanya tuntutan pengaturan model birokrasi dan kekuasaan secara mandiri, bahkan pada titik yang ekstrem daerah menghendaki lepas dari pemerintah pusat (Jakarta).

Lagi-lagi ini menjadi cikal bakal

terjadinya konflik vertikal antara etnis tertentu dengan pemerintah pusat. Konflik ini ternyata tidak mampu teredam sebagaimana saat pemerintahan orde baru yang dengan sigap meredam –memusnahkan-embrio perlawanan kelompok etnis atau agama sekalipun. Lihat saja kegagalan yang dialami kelompok *disident* seperti pada peristiwa Talangsari (Lampung), peristiwa Bantaqiyah, peristiwa Situbondo, peristiwa plaza Medan, peristiwa Peka-longan yang kebetulan kental dengan nuansa agama, atau seperti peristiwa Sanggau, Pontianak yang meski juga dipicu oleh keinginan membela etnis, masih juga ada nuansa Islam (Idrus, 1997). Pemerintah orde baru dengan sigap memberantas segala gerakan tersebut.

Mensikapi banyaknya gerakan separatisme, pemerintah Indonesia di bawah presiden B.J Habibie beraksi dengan menawarkan opsi otonomi seluas-luasnya. Memang harus diakui reaksi pemerintahan Jakarta begitu reaktif – mungkin juga karena tekanan pemerintahan negara asing-. Respon yang muncul dari daerah penuntut begitu variatif sebagai misal Kaltim menghendaki adanya negara federal, sementara Timor-timur dan Aceh (kecenderungannya) menghendaki lepas dari NKRI. Sejarah mencatat pada akhirnya Indonesia harus melepas satu propinsi yang masuk belakangan dalam negara kesatuan malah justru melepaskan diri yang pertama, Timor-timur.

Mentengarai perjalanan sejarah gerakan separatis yang ada, tampak betapa *etnis identity* sebagai simbol jatidiri etnis lebih dekat dengan nuansa politik. Sudah dapat diduga apa kelanjutan dari adanya persepsi ini, yaitu munculnya keinginan berbangsa sendiri seperti yang pernah terjadi pada masa jaman kerajaan

dahulu, dan tentu saja hal ini akan merusakkan fondasi kenegaraan yang telah sama dibangun selama lebih dari setengah abad ini.

Secara psikologis sebenarnya apa yang menjadi *basic need* dari munculnya keinginan tersebut? Apakah hal itu bukan sekedar pelampiasan emosional, dari rasa yang selama masa orde baru dipendam. Atau hanya ingin sekedar menunjukkan *ethnic identity*? Lazimnya harus ada kesepakatan bahwa identitas etnik memang harus dipertahankan bahkan ditegakkan, namun bukan dalam dimensi politis semata tetapi juga secara psikologis. Artinya pada setiap kita harus memiliki kesadaran dari mana kita berasal, dan ada keinginan untuk tetap menjunjung budaya etnis tersebut. Meski demikian, hal itu bukan menjadi satu keharusan untuk diwujudkan secara politis dengan menyempal dari negara kesatuan yang telah ada.

Munculnya rasa etnonasionalisme ekstrem pada akhirnya hanya akan menyumbang pada lahirnya negara yang tercabik-cabik sebagaimana yang terjadi pada negara-negara Balkan. Sebab pada dasarnya etnisitas lebih cenderung pada gejala separatisme dibanding merajut untaian persatuan. Dengan begitu yang harus disadari adalah bukan hanya sekedar memandang persoalan etnik dari sisi politik semata, namun unsur psikologis harus pula diajukan sebagai pembandingnya. Sebab, dari sisi psikologis kesadaran akan adanya rasa memiliki pada etnis memang diakui, namun dari sisi ini bukan lalu harus diwujudkan dengan membentuk *nation state* kecil yang justru menceraiberaikan tali persatuan. Kesadaran akan *ethnic identity* dibangun agar setiap individu tidak mengalami *lost identity*.

Bahkan justru pada era global saat

ini, kesadaran akan *ethnic identity* diperlukan agar tidak terjadi seperti bangsa-bangsa lain di negara berkembang yang kehilangan kepribadian kebangsaannya. Hal tersebut setidaknya dapat disimak dari pelajaran terbuka dari Negara Philipina, ataupun India yang hingga hari ini masih merasa kesulitan untuk membuat kesepakatan tentang bahasa resmi yang digunakan.

Tampaknya saat ini dibutuhkan forum dalam skala nasional yang dapat secara "nyaman" membicarakan munculnya kesadaran akan etnonasionalisme pada banyak suku di Indonesia. Hal ini penting, mengingat rajutan benang nasionalisme tampaknya semakin lama, semakin terus diurai oleh banyak kalangan yang mengatasnamakan etnis. Di samping itu adalah ketegasan pihak pemerintah untuk memberlakukan hukum secara adil. Dalam setiap penyelesaian kasus, hendaklah tidak terjadi proses pemihakan, yang akhirnya akan menguntungkan satu pihak saja.

Faktor Dominan Disintegrasi

Liddle (1970) dalam tulisannya mengungkap bahwa ditengarai ada kendala dalam persoalan integrasi di Indonesia, yang secara singkat dirumuskannya pada dua dimensi horizontal dan vertikal. Pada sisi horizontal muncul persoalan suku, ras, agama dan geografi, sedangkan sisi vertikal adalah adanya perbedaan antar elite dan massa. Pada sisi horizontal itulah yang diberikan Tuhan pada bangsa ini. Satu fenomena yang cenderung pada kodrati sebagaimana terungkap dalam salah satu firmanNya menyatakan bahwa Dia menciptakan manusia bermula dari satu keturunan dan daripadanya dijadikan suku-suku dan golongan. Pada

sisi ini harus disadari bahwa perbedaan suku, ras, agama dan geografi merupakan satu keniscayaan, meski demikian hal tersebut bukan menjadi alasan untuk menjadikannya sebagai *triger* bagi pecah-belahnya persatuan. Artinya pada sisi ini para pemegang kebijakan pada masing-masing etnis memiliki peran untuk mengarahkan "gerbong etnis" yang dipimpinya.

Berbeda memang dapat diartikan lain, namun hendaklah tidak diartikan tidak sama (yang karena itu, tidak baik). Disadari bahwa setiap individu dengan individu lain, memang memiliki ke-khas-an yang menjadi ciri di antara mereka. Jangankan dari *nasab* yang berbeda, sedangkan dari bapak dan ibu yang sama masih terbuka melahirkan individu yang berbeda. Selama ini sejujurnyalah selama ini muncul *image* di masyarakat kita bahwa beda selalu diidentikan dengan tidak sama (dengan saya), dan karena tidak sama dengan dirinya lalu muncul konotasi bahwa yang tidak sama itu jelek, kurang baik. Hal tersebut karena yang menjadi tolok ukur adalah dirinya subjektif, bukan diri yang objektif. Dengan begitu akan terasa sulit untuk melihat "diri lain" darinya sebagai kebenaran, yang semestinya juga diterima olehnya.⁵

Terlepas dari itu bahwa sebenarnya

⁵Harus diakui banyak di antara kita yang kerap melihat setiap persoalan hanya dari perspektif dalam (inner perspective) bahwa segala yang baik adalah muncul dari dirinya, dari kelompoknya, atau dari etnisnya. Sementara apapun yang muncul dari orang lain, kelompok (golongan) lain, etnis lain adalah salah dan keliru. Kebenaran hanya milik dirinya saja, dan orang lain tidak memiliki kebenaran. Situasi ini menjadi cikal bakal konflik dalam segala situasi.

Dari yang "lain" itu sebenarnya ada yang sama, dan inilah yang hendaklah selalu diupayakan, mencari titik temu di antara individu, etnis, golongan. Barangkali ini pula sebagai rahasia Tuhan mengapa Dia menciptakan manusia di dunia ini dengan beragam suku, ras, agama, golongan, ataupun bangsa yang berbeda. Jika hendak kembali pada isyarat Tuhan, maka keharusan setiap individu satu dengan individu lainnya adalah "saling mengenal" (taaruf).

Dari sisi vertikal persoalan integrasi bangsa⁶ ini dapat gagal karena celah perbedaan antara elit dan massa. Dalam tulisannya tentang konsekuensi budaya Hofstede (dalam Heckhausen dan Lang, 1996) meneliti respon individu terhadap nilai-nilai budaya di 40 negara dan membaginya menjadi 4 dimensi, yaitu: (1) *individual-collectivism (IC)*; (2) *power distance (PD)*; (3) *masculinity-feminity (MF)*; (4) *uncertainty avoidance (UA)*. Di antara keempat dimensi budaya tiga di antaranya begitu kuat (tinggi) di Indoensia, dan satu yang cenderung rendah.

Pertama *individual collectivism*. Inti dari konsep ini adalah seberapa besar suatu budaya memberikan otonomi pada anggotanya. Menerapkan konsep ini pada realita masyarakat Indonesia, tampaknya tingkat IC bangsa ini termasuk rendah. Artinya, masyarakat bangsa ini cenderung memilih budaya kolektif, semua tanggung-jawab dibagi rata pada kelompok. Situasi ini begitu kentara saat berkuasanya pemerintahan orde baru. Segala hal merupakan kesepakatan bersama, penentuan segala sesuatu dilakukan secara bersama, dan jika ada akibat yang muncul dari keputusan tersebut akan ditanggung secara bersama pula.

Pada kondisi semacam itu, tampak

nyata tidak ada pembantu presiden yang mengundurkan diri karena kesalahan individu yang dibuatnya. Sifat ksatria sebagai aturan main kelompok, menjadi mandul dan tidak berguna sama sekali. Mundur dari jabatan merupakan satu hal yang mustahil dalam situasi politik Indonesia. Situasi ini kembali berulang, dengan jatuhnya vonis pengadilan pada ketua DPR RI, Ir Akbar Tanjung. Adanya tuntutan mundur dari anggotanya, malah justru anggota tersebut dikenai sanksi.

Budaya kolektif yang dibangun pemerintah orde baru menginginkan segala sesuatu diatur dari pusat, model pemerintahan yang sentralistik. Segala kebutuhan daerah telah diatur dari pemerintah pusat Jakarta, padahal tidak selamanya pemerintah pusat memahami persoalan-persoalan daerah secara lebih detail. Akhirnya yang muncul adalah perasaan sebagai "sapi perah" yang dikaryakan oleh pemerintah pusat Jakarta. Tentu saja perasaan-perasaan ini pada akhirnya menumbuhkan kesadaran untuk mengatur segala persoalan daerahnya secara mandiri. Inilah salah satu munculnya cikal bakal keinginan menyempal dari pemerintah daerah.

Harus diakui bahwa budaya kolektif memiliki beberapa keunggulan seperti adanya kebersamaan dalam segala situasi, baik senang ataupun susah. Hanya saja kelemahannya juga bukan hal yang sepele, seperti sulit untuk menemukan siapa yang bersalah dalam satu peristiwa, sebab kelompoknya akan melindungi dengan pelbagai cara dengan dalih kebersamaan tadi. Atau seandainya terjadi kesalahan, maka akan si pembuat salah tersebut akan melepaskan diri (cuci tangan) dan kemudian melemparkannya pada kelompok.

Tingginya *power distance* pada

suatu bangsa ditandai dengan beberapa ciri seperti : (1) jauhnya jarak psikologis antara pejabat dengan rakyatnya ; (2) sistem birokrasi yang panjang ; (3) formalitas; (4) kondisi birokratis yang tetap terbawa hingga situasi di luar kantor. Mentengarai masyarakat bangsa ini tampak saat ini begitu kentara, betapa jarak psikologis antara pejabat sebagai pemegang kekuasaan dengan rakyat sebagai yang diperintah begitu jauh.

Sebagaimana dipahami model kepemimpinan yang diterapkan di Negara cenderung model feodal. Hal tersebut terlihat dari perilaku para pemimpin –yang mengidentikan dirinya sebagai kelompok ningrat (raja)- yang selalu ingin dilayani. Akibatnya, merasa bahwa dirinya merupakan kelompok elite, maka terkadang tingkah para pemimpin menyakitkan hati rakyat. Sebagai misal, saat rakyat menderita dengan situasi krisis, sekelompok anggota dewan yang katanya wakil rakyat malah justru melakukan tur ke luar negeri.

Pemerintahan kerajaan memang meninggalkan jarak psikologis antara pemimpin dengan mereka yang dipimpin, dan seharusnya situasi itu tidak terjadi pada negara yang menganut paham demokrasi seperti Indonesia. Budaya feodalisme sebagai warisan para penjajah ternyata begitu dipelihara, dan hal ini sebenarnya secara psikologis lebih menunjukkan tentang kelemahan pimpinan. Artinya, mungkin saja situasi tersebut memang sengaja diciptakan untuk membangun image kewibawaan yang mungkin tidak dimilikinya sebagai imbas ketidakprofesionalan dirinya menjalankan statusnya.

Model birokrasi yang diterapkan pemerintah Indonesia memang tergolong sulit dan panjang. Banyak meja yang harus

dilalui untuk mengurus segala hal. Debirokratisasi yang coba diterapkan dengan maksud untuk lebih mengkuruskan birokrasi tampaknya tak memiliki dampak signifikan. Banyak keluhan muncul dari masyarakat betapa sulit untuk mengurus keperluannya. Bukan hanya itu, model birokrasi yang diterapkan juga membuka peluang terjadinya korupsi di mana-mana.

Untuk masyarakat Indonesia, formalitas tampaknya tidak dapat dilepaskan dari kehidupan bangsa ini. Sejak awal kelahiran seseorang hingga kematiannya formalitas selalu menyertai dan menjadi bagian dari dirinya. Sebagai contoh untuk situasi resmi di kantor, ternyata bagi bawahan sulit untuk membedakan situasi kantor dan bukan kantor. Hal ini karena kemanapun perginya pimpinan kantor tetap sebagai pemimpin individu bawahannya, meski itu sudah di luar situasi dinas. Hal ini tentu saja berimbas pada model pelayanan yang harus mereka terima, juga harus sama seperti di kantor. Para pemimpin tidak lagi dapat membedakan kapan dia harus bersikap sebagai pemimpin, dan kapan harus bersikap sebagai teman diskusi. Perlakuan dan penghargaan berlebihan terhadap pemimpin telah melampaui batas kewenangan mereka sebagai pemimpin. Pada akhirnya budaya mohon petunjuk muncul di mana-mana.

Budaya terakhir yang disinyalir Hofstede adalah *uncertainty avoidance* yaitu kecenderungan untuk menghindarkan diri dari ketidakpastian. Semakin tinggi satu budaya dalam hal *uncertainty avoidance*, semakin pasti aturan yang ada di masyarakat bangsa itu. Untuk masyarakat Indonesia, tampaknya kondisi *uncertainty avoidance* ini rendah. Hal ini tampak dari banyaknya ketidakpastian yang ada di masyarakat bangsa ini. Sebagai misal jam

kerja untuk PNS, yang dimaknai secara variasi. Mereka yang datang cepat dan yang datang lambat, oleh lembaga disikapi secara sama. Mereka yang bekerja dengan volume pekerjaan lebih banyak dengan yang minimal, menerima gaji dengan aturan dan jumlah yang sama.

Dalam dunia hukum, saat ini tidak lagi ditemukan satu kepastian hukum. Banyak contoh betapa orang yang benar malah dihukum, orang melapor malah menjadi tersangka, orang yang tidak tahu ujungpangkal satu kejadian harus mendekam di penjara, sementara si pelaku bebas melarikan diri. Sengkon dan Karta adalah contoh dua manusia Indonesia yang mengalami ketidakpastian hukum, juga keluarga Udin –wartawan Bernas- yang hingga saat ini menunggu penyelesaian kasus yang menimpa Udin. Masyarakat selalu disuguhi “korban sementara” sebagai pembujuk bahwa pihak aparat bekerja dengan baik.

Hukum di Indonesia menjadi pasti, jika aparat penegak hukum sudah konsisten dalam penegakan hukum, dan tidak bicara di luar hukum. Sebab, pada saat muncul diskusi di luar jalur hukum, maka yang muncul adalah siapa berani membayar, berapa? Pada akhirnya sulit untuk menghadirkan kepastian, dan justru ketidakpastian itulah menjadi satu kepastian.

Terakhir adalah *masculinity-femininity*, budaya Indonesia hingga hari ini lebih banyak mengagungkan kelompok laki-laki di banding wanita. Banyak posisi yang tampaknya tertutup untuk kelompok wanita. Lagi-lagi hal ini banyak mengadopsi dari budaya Jawa yang menganggap-wanita sekedar *konco wingking*, yang kehadirannya hanya saat dibutuhkan saja, selain itu tidak.

Dalam tulisannya Eriksen (1993)

mengungkap bahwa identitas jenis kelamin juga dapat menjadi alasan dalam membangun hubungan sosial yang luas dan penting dalam kelompok masyarakat manusia, walaupun hal ini jarang diperbandingkan dalam organisasi politik. Dalam hal ini jenis kelamin dalam konteks etnisitas adalah suatu konteks budaya dan tidak dalam konteks biologi. Artinya *gender* bukan hanya sekedar fenomena biologi saja, tapi lebih pada budaya, dimana satu budaya tertentu lebih dikonotasi sebagai budaya laki-laki dan budaya lain cenderung wanita, yang di dalamnya sebetulnya terjadi dominasi budaya atas budaya lainnya.

Agar terjadi proses integrasi yang lebih baik, maka budaya-budaya negatif harus mulai diubah. Berikan pada daerah otonomi sebagaimana seharusnya, kekuasaan mengatur daerah diberi porsi lebih banyak pada daerah, kurangi jarak psikologis atasan bawahan, pemimpin dengan rakyat, lakukan debirokratisasi dengan sungguh-sungguh, tegakkan kepastian dan hindari ketidakpastian, berikan peluang yang sama pada seluruh rakyat untuk maju.

Etnis dengan segala budayanya diberi peluang yang sama untuk maju, dan diberi perhatian yang sama pula. Membangun integrasi antar etnis dilakukan tidak dengan cara menekan budaya satu dan meninggikan etnis lainnya, tapi justru dengan melakukan mobilisasi kesadaran mengenai adanya interdependensi di antara etnis.

Terkait dengan proses integrasi ini, Gordon (1976) mengajukan model asimilasi sebagai cara untuk melakukan integrasi pada masyarakat yang plural. Asimilasi yang dimaksud Gordon adalah (1) asimiliasi kultural; (2) asimilasi struktural; (3) asimilasi marital; (4) asimilasi

identifikatif; (5) asimilasi sikap penerimaan tanpa prasangka; (6) asimilasi tingkahlaku tanpa diskriminasi; dan (7) asimilasi kewarganegaraan tanpa konflik nilai dan kekuasaan.

Dalam bahasan tentang tema integrasi ini Gordon juga memberi wacana bahwa pelaksanaan asimilasi tersebut harus pula mengeliminir faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi proses integrasi masyarakat yang disebutnya sebagai (1) *bio-social development variables*; (2) *interaction process variables*; (3) *societal variables*. Faktor pertama merujuk pada variabel-variabel yang memperhitungkan kondisi biologis seseorang yang menunjukkan kapasitasnya pada tiga tingkatan aktivitas, yakni kepuasan dari kebutuhan psikologis, kesadaran atau pemahaman mengenai integrasi dan tanggapan emosional atau sikap terhadap integrasi.

Tiga hal tersebut dianggap penting bagi upaya sosialisasi yang membolehkan seseorang berperan dalam suatu masyarakat. Pada sisi ini betapa perlunya memahami kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya biologis dan psikologis seseorang, di samping nuansa politik tentang pemahamannya pada persoalan integrasi. Terpenuhinya sisi ini akan membuat seseorang memiliki komitmen untuk membangun integrasi berdasar pada keragaman yang dimilikinya. Artinya dengan utuhnya pemahaman tentang faktor ini akan menjadi jaminan sikap seseorang untuk tetap memegang teguh komitmen pada negara kesatuan.

Faktor kedua yang oleh Gordon disebutnya sebagai *interaction process variables* mengacu pada harga diri dan kehormatan dalam hubungan antar etnis, serta eksistensi *stereotype* etnis. Selain itu

juga kecenderungan sikap yang tidak membedakan status etnis dalam melakukan kontak antar etnis. Pada sisi ini, penghargaan etnis sebagaimana adanya merupakan salah satu syarat mutlak bagi terjalannya interaksi sosial yang harmonis. Penghargaan-penghargaan tersebut harus diwujudkan dari segi politik, dan psikologis.

Faktor ketiga yaitu *societal variables*, merujuk pada gejala demografi suatu kelompok etnis tertentu, seperti ukuran absolut mengenai kelompok mayoritas dan minoritas. Dimensi lain dari aspek ini adalah penyebaran dan konsentrasi kelompok minoritas dan di suatu wilayah, penduduk desa-kota. Disadari bahwa dari sisi penyebaran penduduk pada wilayah nusantara ini memang tidaklah merata. Konsentrasi terbanyak penduduk pada wilayah perkotaan, dan dari sisi pulau yang didiami pulau Jawa menempati tempat pertama dari sisi kepadatan.

Sebagai upaya penyatuan, maka wacana mayoritas dan minoritas bukan lagi hal yang perlu didengung-dengungkan. Mereka yang mayoritas bukan lalu menjadi penguasa dan minoritas sebagai kelompok yang dikuasai, namun pembagian kekuasaan, peluang hendaknya lebih merujuk pada sisi kemampuan profesional, dan menghindari praktek kolusi ataupun nepotisme seperti yang selama ini masih terjadi.

Selain itu, membicarakan kesadaran akan etnonasionalisme secara arif tampaknya perlu diupayakan dalam skala nasional, agar tidak lagi berkembang niatan menyempal hanya sekedar menuruti muatan emosi semata. Jika musyawarah selalu didengungkan sebagai sikap yang selalu dikedepankan bangsa ini, mengapa muncul keengganan untuk melakukannya saat bangsa ini justru berada pada biduk yang mulai retak. Tentu saja beberapa fak-

tor yang cenderung dominan bagi munculnya disintegrasi harus terlebih dahulu dieleminir.

Jika pada bangsa Jerman telah berhasil menghilangkan sekat yang semula membatasinya, negara Korea (Utara dan Selatan), Taiwan dan Cina saat ini juga mulai menjajaki rujuk nasionalnya. Mengapa kita hendak memutuskan tali silaturahmi yang telah tersimpul manis. Alih-alih kita dapat belajar dari fenomena pelangi, yang justru menjadikannya indah adalah keberagamannya. Semoga kesadaran etnonasionalisme hanya sekedar wacana psikologi yang murni dari intervensi politik, sehingga kita dapat tetap menikmati kejayaan bangsa ini.●

Daftar Pustaka

- Alfian. 1986. *Transformasi Sosial Budaya dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: UI Press.
- Arifin, M. 2001. *Proses Hegemoni Kebudayaan Jawa dalam Kehidupan sosial, Budaya dan Politik Indonesia: Suatu Perspektif Antropologis*. Retrieved From The World Wide Web: <http://fisip.unmul.ac.id/hegemoni.html> Oktober 8, 2001.
- Berry, J.W., Poortinga, Y.H., Segall, M. H., Dasen, P. 1992. *Cross Cultural Psychology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Castles, L. 1995. Etnisitas dan Keutuhan Wilayah Negara-negara: Pandangan Global. Dalam *Sumbangan Ilmu-Ilmu Sosial terhadap Konsep Ketahanan Nasional*. Ichlasul Amal dan Armaidly Armawi (Ed). 199-203. Yogyakarta: UGM Press.

- Eriksen, T. H. 1993. *Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspective*. London: Pluto Press.
- Gerungan, W.A. 1988. *Psikologi sosial*. Bandung: PT. Eresco.
- Gordon, M.M. 1976. *Toward a General Theory of Racial and Ethnic Group Relation*. Dalam Glazer dan Moynihan (Eds). (1976). *Ethnicity, Theory and Experience*. Cambridge: Harvard University Press.
- Heckhausen, J., & Lang, F.R. 1996. Social Construction and Old Ages Normative Conceptions and Interpersonal Processes. Dalam *Applied Social Psychology*. Semin, G. R & Fiedler, K (Ed). London: SAGE Publications.1
- Horowitz, D.L. 1985. *Toward a General Theory of Racial and Ethnic Group Relations*. dalam *Theory and Experience*. Glazer dan Moynihan (ed). Cambridge: Harvard University Press.
- Idrus, Muhammad. 1997. *Ukhuwah Islamiyah sebuah peradaban baru?*, dalam *Jurnal Mukadimah no. 4 Th. III/1997*. Hal. 120-127. Yogyakarta: Kopertais Wilayah III dan PTAIS DIY.
- Koentjaraningrat, 1993. *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional*. Jakarta: UI Press.
- Liliweri, A. 1994. Prasangka Sosial dan Efektivitas Komunikasi Antar Etnik di Kupang. Dalam *Perspektif Pembangunan NTT: Dinamika dan Tantangan Pembangunan NTT*. Alo Liliweri dan Gregor Neonbasu (Ed). Halaman 1-28. Kupang: PT. Yayasan Citra Insan Pembaru.
- Martin, J.G., & Franklin, C.W. 1973. *Minority Group Relations*. Columbus, Ohio: Merrill Publishing Company.
- Mitchell, J.C. 1974. "Perceptions of Ethnicity and Ethnic Behavior: An Empirical Exploration." Dalam *Urban Ethnicity*. Abner Cohen (Ed). 1-35. London: Tavistock Publications.
- Safa'at, R. 1996. Masyarakat Adat yang Tersingkirkan dan Terpinggirkan. Dalam *Laporan Observasi tentang Dampak Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa terhadap Masyarakat Adat di Irian Jaya, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur*. Jakarta ELSAM
- Segall, M.H., Dasen, P.R., Berry, J.W., Poortinga, Y.H. 1990. *Human Behavior in Global Perspective: an Introduction to Crosscultural Psychology*. New York: Pergamon General Psychology Series.

